

EVALUASI IMPLEMENTASI HAK PELAYANAN BERDASARKAN UU NO 08 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH LUAR BIASA BHAKTI WIYATA DI SURABAYA

Febhy Dwi Rachmanda ¹⁾, Sedarmayanti ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: rachmandhafebhy@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi hak pelayanan berdasarkan UU No. 08 Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Bhakti Wiyata di Surabaya. Evaluasi pada penelitian untuk menganalisis implementasi undang-undang atas kurikulum dan sarana prasana di SLB Bhati Wiyata Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data yang merupakan hasil skor dari jawaban kuisioner para responden, yang terdiri atas Yayasan, kepala sekolah, para guru, dan orang tua peserta didik.

Hasil analisis dari penelitian ini menyebutkan bahwa kurikulum dan sarana prasarana yang diimplementasikan di SLB Bhakti Wiyata layak (sesuai) dengan UU No. 08 Tahun 2016 dengan nilai rata-rata 4 (layak).

Kesimpulan dari penelitian ini, melalui evaluasi implementasi hak pelayanan berdasarkan UU No. 08 Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Bhakti Wiyata di Surabaya; dapat diketahui kelayakan hak layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Hak Pelayanan, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the implementation of the right to service under Law no. 08 of 2016 concerning Inclusive Education at the Bhakti Wiyata Special School in Surabaya. Evaluation on research to analyze the implementation of laws on the curriculum and infrastructure facilities at the Bhakti Wiyata Extraordinary School Surabaya. This research method uses a qualitative method using observation and library data which is the result of the answers written by the researchers by the observers, which consist of the Foundation, school principals, teachers, and parents of students with special needs.

The results of the analysis of this study state that the curriculum and infrastructure implemented at the Bhakti Wiyata Extraordinary School are appropriate (in accordance) with Law no. 08 of 2016 with the need to improve existing facilities in schools, especially facilities in the field of learning, as well as adding teachers with competent fields. Because the government currently demands that teachers who teach children with special needs must be in accordance or what we usually call linear

The conclusion of this study, through evaluating the implementation of the right to service based on Law no. 08 of 2016 concerning Inclusive Education at the Wiyata Outer School in Surabaya; it can be seen the feasibility of service rights for students with special needs with a note of the addition of teachers and the feasibility of service rights for children with special needs according to their fields, with the aim of achieving learning that is in accordance with the current curriculum, because children with special needs need proper assistance. special treatment to special treatment and a conscience that is in line with the vision and mission of the Bhakti Wiyata Surabaya Extraordinary School curriculum.

Keywords: Evaluation, Implementation, Right To Service, Students With Special Needs

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa. Hal tersebut relevan dengan pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara

berhak mendapatkan pengajaran. Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab atas kemajuan dalam pendidikan nasional. Yang dimaksud tiap-tiap warga negara di sini adalah setiap warga Negara Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, ekonomi maupun keterbatasan fisiknya karena semua mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan pengajaran. Pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari dasar yaitu pendidikan dasar bagi anak-anak. Jadi anak-anak tersebut memegang peranan penting dalam pembentukan suatu sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dijadikan sorotan oleh berbagai negara-negara di dunia saat ini, termasuk dinegara kita Indonesia. Pendidikan di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak muli, serta keterampilan yang diperlukan drinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan anak berkebutuhan khusus atau Lembaga Pendidikan Luar Biasa adalah lembaga pendidikan yang profesional, yang bertujuan membentuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan (Mulyadi, 2010) Pembelajaran adalah suatu usaha sadar yang dilakukan guru untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Hal ini ditunjang oleh (Pribadi, 2017) dalam bukunya menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam diri individu. Proses belajar mengajar dapat dilakukan oleh semua orang terutama oleh siswa di sekolah, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun SLB. Setiap siswa disekolah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fisik, sifat, kebiasaandan sebagainya. Salah satuyang mendasari perbedaan tersebut adalah perbedaan antara anak normal dan anak

berkebutuhan khusus (ABK). Anak normal merupakan anak yang memiliki kondisi tubuh dan IQ yang normal. Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki kekurangan atau kecacatan pada fisik, psikologis,kognitif dan social berbeda dengan anak normal lainnya. Pendidikan anak berkebutuhan khusus atau Lembaga Pendidikan Luar Biasa adalah lembaga pendidikan yang profesional, yang bertujuan membentuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan Menurut Pasal 133 ayat 4 dalam PP No. 17 Tahun 2010 menetapkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Lembaga pendidikan Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan atau penanganan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu Sekolah Inklusi, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Namun di Indonesia sekolah yang secara khusus dan sekolah tertua menyelenggarakan penanganan kepada anak berkebutuhan khusus adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). tujuan, penelitian ini secara umum untuk menganalisis evaluasi implementasi UU No. 8 Tahun 2016 Tentang hak pelayanan publik slb x di surabaya dengan tujuan khusus sebagai berikut.

- 1) Mengetahui akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi di SLB X Surabaya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016.
- 2) Mengetahui pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik di SLB X Surabaya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan

Penggunaan bahasa kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontennya. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil

untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan. Keduanya mempunyai pola tersendiri dalam proses, pelaksanaan dan evaluasinya sehingga harus dibedakan penggunaannya.

Ada banyak pendapat tentang kebijakan. (smith, 2009) mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. Dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan publik. Apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik.

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

Suatu kebijakan adalah dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Di samping itu, kebijakan menjadi pemecahan masalah yang timbul dilingkungan masyarakat. Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Tetapi dengan adanya kebijakan, permasalahan yang ada terselesaikan dan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi

pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Budiardjo kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2014: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Dari pengertian tentang kebijakan pemerintah yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintah atau aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Makna Kebijakan

Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (winarno, 2005) dan (wahab, 2004) sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering

dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada definisi lain yang disampaikan Carl Friedrich yang penting juga didiskusikan. Menurut kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berkenaan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

4. Pengertian Publik

Publik berasal dari kata public diartikan beranekaragaman dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintah.

Irfan Islamy memberikan contoh keanekaragaman pengertian kata publik dalam rangkaian kata sebagai berikut.

- a) *Public Opinion* diterjemahkan dengan pendapat umum. Kata publik mengandung pengertian umum.
- b) *Public Library* diterjemahkan Perpustakaan Rakyat. Kata publik mengandung pengertian rakyat.
- c) *Public Health* diterjemahkan sebagai kesehatan masyarakat. Kata publik ternyata dapat juga diartikan sebagai masyarakat.

Begitu banyaknya makna yang terkandung dalam kata publik beragam namun tersirat satu hal penting yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Karena itulah public policy tidak diterjemahkan sebagai Kebijakan Negara melainkan kebijakan publik, sebab public policy harus berorientasi pada kepentingan publik. Kata Public Administration diterjemahkan Administrasi Negara, namun perkembangan terakhir sekarang ini lebih tepat diartikan sebagai Administrasi Publik karena telah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke kepentingan publik.

5. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan

untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut (Wibawa, 2011: 15).

Menurut Solichin Abdul Wahab, bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan public bertujuan pada perilaku atau Tindakan yang direncanakan
- b. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
- d. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

6. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Brewer dalam Studying Public Policy, proses kebijakan terdiri atas 6 tahap:

- a. Permulaan /penanaman (invensi);
- b. Estimasi (perkiraan);
- c. Seleksi (pemilihan);
- d. Implementasi (penerapan);
- e. Evaluasi (penilaian);

f. Terminasi (penyelesaian).

Dalam pandangan Brewer, invensi atau permulaan mengacu pada tahap paling awal dalam rangkain tersebut ketika masalah akan dirumuskan. Dia menjelaskan bahwa tahap ini dapat digolongkan sebagai tahap perumusan masalah dan pencarian solusi. Tahap kedua adalah perkiraan yang menghitung dan memperkirakan tentang resiko, biaya, dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai solusi yang akan diterapkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini akan melibatkan evaluasi teknis dan pilihan normatif. Tujuan tahap ini adalah untuk mempersempit pilihan-pilihan yang masuk akal dengan tidak memasukkan pilihan-pilihan yang tidak memungkinkan dan menggunakan pilihan-pilihan yang mungkin saja dapat diterapkan. Tahap ketiga terdiri atas pengambilan satu atau kombinasi solusi yang diterapkan hingga akhir tahap ini. ketiga tahap selanjutnya adalah tahap yang memberikan pilihan-pilihan, mengevaluasi hasil dan seluruh proses dan pemberhentian kebijakan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicapai dari evaluasi tersebut.

Menurut Ramesh dalam Studying Public Policy ada lima tahap siklus kebijakan, yaitu :

- a. Penyusunan agenda;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Pembuatan keputusan;
- d. Penerapan kebijakan;
- e. Evaluasi kebijakan.

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pendapat lain mengatakan ditinjau dari sudut bahasa, evaluasi diartikan proses menentukan nilai suatu obyek (Sudijono, 2003:1) selanjutnya, kata evaluation kemudian diserap kedalam istilah bahasa Indonesia menjadi “evaluasi”. Menurut kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (AS Hornby, 2011:151) evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.

Sehingga kata evaluasi sangat berkaitan dengan penilaian ataupun pengukuran.

Namun, evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian maupun pengukuran. Menurut Komite Studi Nasional tentang evaluasi dalam Widoyoko (2017:4) mengungkapkan bahwa “evaluasi merupakan proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.” Hal tersebut senada dengan pendapat Stufflebeam dalam Arikunto dan Safruddin (2004:1) bahwa “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.” Melalui adanya evaluasi tersebut dapat diketahui sejauh mana tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapun pengertian program menurut Arikunto dan Safruddin (2004:3) yaitu suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Sedangkan menurut Farida Yusuf Tayibnapis dalam Widoyoko (2017:8) mengartikan “program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.”

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan. Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan. Sementara Stufflebeam mengungkapkan pula bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Menurut Sondang Siagian istilah evaluasi diartikan sebagai

penilaian, yaitu: “Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

7. Konsep dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dalam perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh William Dunn (2003), pendekatan-pendekatan tersebut antara lain evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan. Berikut dijelaskan masing-masing dari ketiga pendekatan tersebut.

a. Evaluasi Semu

(*Psuedu Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi Formal

(*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan

program. Dari segi metode evaluasi formal menggunakan metode yang sama dengan evaluasi semu. Perbedaannya dengan evaluasi semu ialah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspeksifikasi tujuan dan target kebijakan.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

(Decision-Theoretic Evaluation) adalah pendekatan dengan menggunakan metode-metode dekriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan.

Dalam evaluasi ada hal yang tentunya ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana tujuan evaluasi menurut H. Weiss dalam Mulyadi (2016: 113) yang menyatakan, *to measure the effect of a Program against the goals it set to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program improving future programing*. Weiss menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi adalah bagaimana melakukan pengukuran efek dan dampak dari sebuah program atau kebijakan yang ada pada masyarakat. Beberapa tujuan dan fungsi evaluasi adalah:

- a. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut;
- b. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan;

- c. Memberikan ekplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan;
- d. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana;
- e. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi;
- f. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dalam penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program;
- g. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat social ekonomi dari kebijakan. Misalnya seberapa efektif program yang dimaksud dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan;
- h. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam memenuhi akuntabilitas publik (Anggara :2014, Dunn :2003) dan Ripley :1985).

8. Akomodasi Pembelajaran

Pembelajaran didefinisikan sebagai aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran. Pengertian akomodasi dalam kamus (Kline, 2006) adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus. (Hayden, 2004) memaknai akomodasi sebagai perubahan yang dilakukan supaya siswa berkebutuhan khusus dapat belajar di ruang kelas biasa. Jadi akomodasi dapat diartikan sebagai perubahan berupa penyesuaian dan modifikasi yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Interaksi antara guru dan murid merupakan bagian paling vital. Interaksi positif antara guru dan murid tercermin salah satunya dalam kepekaan guru untuk mengetahui kebutuhan

murid-muridnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui akomodasi pembelajaran. Akomodasi pembelajaran tidak lepas dari PBM. Sebagai sebuah proses, PBM dipengaruhi oleh berbagai faktor dari guru, siswa, maupun lingkungan. Masing-masing faktor tersebut saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuannya (Samsudin, 2004)

Akomodasi pembelajaran merupakan penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak (Rudiyati, 2010). Modifikasi dan penyesuaian tersebut mengacu prinsip keberhasilan yang disegerakan dan menghindari hal-hal yang menyebabkan kegagalan pada anak. Dengan mengacu prinsip tersebut, maka modifikasi dan penyesuaian tersebut dapat dilakukan dalam empat aspek, yaitu: (a) materi dan cara pengajaran, (b) lingkungan belajar, (c) tuntutan waktu dan penjadwalan, (d) tugas dan penilaian di kelas.

C. METODE

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pilihan informan dalam ulasan atau penelitian ini dengan cara Purpose Sampling. Pemilihan informan dengan cara Purpose Sampling ini karena peneliti menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

Adapun sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Sekolah SDLB Bhakti Wiyata
- b) Guru SDLB Bhakti Wiyata
- c) Staff SDLB Bhakti Wiyata
- d) Orangtua Peserta didik SLB Bhakti Wiyata

Adapun strategi yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Data Sekunder, adalah informasi yang diperoleh melalui study Pustaka (Library Research) untuk mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah perundangan tentang pendidikan inklusif; dan data profil sekolah yang ada di Sekolah Luar Biasa Bhakti Wiyata Surabaya.
- b) Data Primer, adalah informasi yang diperoleh dengan melakukan penelitian

langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan

Informasi yang diperoleh Angket. Menurut (Arinkunto, 2011) Ikhtisar Pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang akan memberi Respon berdasarkan dengan permintaan pengguna tersebut. Pada penelitian ini diberikan satu angket untuk:

- a) mengetahui kelayakan akomodasi dalam pelayanan public di SLB;
- b) mengetahui kemudahan dalam mengakses sarana (pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas) di SLB.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, mengamati dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. (Iskandar, 2009) Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan yang di tuju berdasarkan metode pengumpulan datadan melakukan studi pada situasi yang alami.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sekolah Luar Biasa Surabaya Bhakti Wiyata Surabaya merupakan sentra pelayanan khusus untuk pendidikan layanan khusus bagi anak yang mempunyai kelainan (berkebutuhan khusus). dalam lingkungan sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya terdapat 3 tingkatan yaitu:

Tingkat sekolah luar biasa yang terdiri dari tiga jenis ketunaan yaitu tunarungu (b), tunagrahita ringan (c) dan sedang (c1) serta tunadaksa (d) dengan keseluruhan jumlah siswa anak berkebutuhan khusus ada 50 orang siswa. dengan laki-laki jumlah ada 30 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 20 orang yang tersebar di berbagai kelas anak berkebutuhan khusus.

Dari hasil observasi pada sekolah luar biasa bhakti wiyata Surabaya, dengan mengamati total 50 orang anak berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa bhakti wiyata Surabaya serta dari jajaran pengajar atau guru hingga ketua ketua yayasan bhakti wiyata, kepala sekolah bhakti wiyata, guru bhakti wiyata serta wali murid peserta didik bhakti wiyata itu sendiri dengan jumlah memberi pertanyaan total ada 30 yang di ajukan oleh peneliti dan di setujui oleh pihak dari sekolah luar biasa bhakti wiyata Surabaya itu sendiri. Dengan total ada 30 pertanyaan yang diajukan peneliti dibagi menjadi 2. Untuk bagian pertama yaitu pertanyaan mengenai akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi Sekolah Luar Biasa Bhakti Wiyata Surabaya, lalu untuk bagian pertanyaan kedua pertanyaan mengenai Pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik. Akomodasi dalam pembelajaran yang diperuntukkan Bagi anak berkebutuhan khusus sebenarnya mengacu pada dua standar pembelajaran di sekolah kebutuhan khusus, yaitu: prestasi yang terburu-buru dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kekecewaan pada anak. (Hayden, 2004) Hayden Ditambahkan pula bahwa teknik-teknik dalam PKKh sebenarnya dapat diterapkan di kelas-kelas normal dengan asumsi disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Hal ini juga terlihat dalam program pembelajaran Montessori yang dikembangkan dari pembelajaran anak-anak dengan hambatan intelektual dan saat ini sebagian besar dilakukan di lingkungan dasar dan pra sekolah. (Hayden, 2004) mengemukakan tentang tingkat kenyamanan yang dicapai selama pengalaman mengajar dan berkembang (pbn). Tingkat kenyamanan adalah sebagai berikut:

- a) Bahan dan teknik pengajaran;
- b) Tugas dan penilaian di kelas;
- c) Permintaan waktu dan pemesanan;
- d) Iklim belajar; Dan
- e) Pemanfaatan kerangka korespondensi yang unik.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat berbicara dengan suasana umum melalui bahasa yang tidak memiliki kekhususan khusus sehingga penting untuk menggunakan korespondensi guru yang luar biasa, selain anak-anak dengan cacat pendengaran dan bicara serta mental.

Dalam penelitian ini, hasil dari observasi peneliti dengan terjun langsung ke sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya untuk menganalisis hasil peneliti tersebut untuk mengukur data kualitatif baik berupa tanggapan positif maupun tanggapan negative. Dari hasil peneliti terhadap narasumber kelayakan akomodasi dalam pelayanan Publik Secara Optimal, Wajar, Bermartabat Tanpa Diskriminasi di narasumber pertama yaitu guru berintegrasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dengan guru memberikan akomodasi yang layak salah satunya, memperhatikan dengan betul apa yang di kerjakan oleh peserta didik tanpa adanya kata-kata yang tidak pantas untuk peserta didiknya, serta memberikan penjelasan dengan teknik tertentu untuk peserta didik anak berkebutuhan khusus, serta guru lebih banyak memberikan pengajaran lebih ke bermain main di usia khusus dengan anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kasus anak tersebut, sebagai contoh anak yang kena gangguan mental, pengajaran lebih banyak dilakukan untuk kehidupan sehari hari serta melatih mengontrol anak yang mempunyai kasus gangguan mental. Berdasarkan informasi dari narasumber untuk anak yang paling susah mendapatkan pengajaran yaitu anak autisme yang berkelainan ganda salah satu contoh yaitu slowlener dengan anak yang hiperaktif dan merusak barang sekitar anak berkebutuhan khusus. Lalu kedua saya berwawancara dan melakukan observasi dengan kepala sekolah sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah pertama yaitu kelayakan akomodasi dalam pelayanan publik secara wajar, optimal, bermartabat dan tanpa diskriminasi. Kepala sekolah hingga turun langsung di anak berkebutuhan khusus membantu guru-guru yang menangani anak dengan kasus yang menurut kepala sekolah tersebut parah dan perlu pendampingan lebih dari satu guru, kata kepala sekolah “kita mengajar di sekolah luar biasa ini sangat capek tapi menyenangkan, kenapa saya bilang capek dari pada guru sekolah dasar pada umumnya ? karena kira harus dituntut untuk melakukan hal yang berbeda sesuai mas bilang berdasarkan undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang pendidikan inklusif. Kita harus berpatokan terhadap undang-undang tersebut mas, itu menjadi acuan utama kita bisa melakukan hal hal yang berlandaskan undang-undang. Yang

terpenting, khusus untuk guru-guru sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya bekerja harus sesuai dengan hati nurani, dengan hati nurani kita bekerja akan lebih ikhlas dan akan lebih menyanyangi seperti anak kita sendiri. Akhirnya alhamdulillah guru-guru disini se amati saya bekerja dengan hati nurani sesuai dengan agama masing-masing, untuk rejeki akan mengikuti selanjutnya” kata kepala sekolah sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya. Lalu selanjutnya peneliti, melakukan observasi dan melakukan wawancara terhadap orang tua peserta didik anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti terhadap orangtua peserta didik adalah, kenapa anak di sekolahkan di sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya, kata orangtua peserta didik menjawab “anak saya kan anak yang istimewa ya mas, jadi saya dapat info dr orangtua yang punya anak istimewa bawasannya sekolah disini untuk orangtua tidak perlu khawatir karena disini benar-benar gurunya terhadap anak saya di anggap seperti anaknya sendiri, serta fasilitas yang di dapat anak saya, saya rasa cukup. Yang terpenting anak saya sangat aman untuk sekolah di bhakti wiyata surabaya ini mas, kadang juga kepala sekolah mengadakan pertemuan orangtua semua untuk membahas bagaimana perkembangan anak setelah sekolah di bhakti wiyata. Dan juga orangtua di tuntut oleh sekolah ketika sudah berada di rumah harus banyak interaksi dan harus sangat sangat diperhatikan selaknyanya anak normal, dan di usahakan jangan menggunakan jasa asisten rumah tangga hanya untuk mengurus anak istimewa”

Dari hasil observasi peneliti terhadap observan pada Sekolah Luar Biasa Bhakti Wiyata Surabaya, dengan mengambil total 4 observan yang di amati oleh peneliti, yaitu Ketua yayasan, kepala sekolah SLB bhakti wiyata surabaya, guru atau pendamping anak berkebutuhan khusus serta orangtua anak berkebutuhan khusus responden dari SLB Bhakti Wiyata surabaya yang diambil peneliti untuk observan dari ketua yayasan SLB Bhakti Wiyata, Kepala Sekolah SLB Bhakti Wiyata, Guru SLB Bhakti Wiyata serta wali murid peserta didik SLB Bhakti Wiyata itu sendiri dengan menanyakan jumlah pertanyaan yang di jawab untuk observan ada 30 butir yang di ajukan oleh peneliti serta disetujui oleh pihak sekolah luar biasa Bhakti Wiyata Surabaya. Dengan Pertanyaan mengarah pertanyaan kemudahan pendampingan, penerjemah, dan

penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan public untuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri sesuai dengan rumusan masalah peneliti No. 2 . Untuk pertanyaan no 1 hingga nomor 15 pertanyaan mengarah ke kelayakan akomodasi yang layak dalam pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi. Pengertian pendampingan itu sendiri berdasarkan direktorat bantuan social adalah cara paling umum untuk memberikan akomodasi yang diberikan oleh sekutu kepada klien dalam membedakan kebutuhan dan mengatasi masalah serta memberdayakan pengembangan dorongan dalam siklus dinamis, sehingga otonomi dapat dipahami. (Sosial, 2007) Pembinaan adalah metodologi yang sangat menentukan hasil dari program penguatan wilayah, sesuai pedoman membantu individu. Dalam konteks kali ini ditugaskan sebagai pendamping bukan pemecah masalah. Menurut (Sumodiningrat, 1997) pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Pendampingan sebagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui:

a) Peningkatan Kesadaran dan Persiapan Kemampuan

Perhatian publik yang diperluas dapat dicapai melalui pelatihan penting, kemajuan vaksinasi dan disinfeksi, sementara kemampuan dapat diciptakan melalui cara-cara partisipatif. Sementara itu, informasi terdekat yang dipindahkan oleh daerah setempat melalui pengalamannya dapat digabungkan dengan informasi dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu orang miskin membuat mata air pekerjaan mereka sendiri dan membantu mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka sendiri.

b) Persiapan Sumber Modal

Ini adalah teknik untuk mengumpulkan aset individu melalui dana investasi biasa dan hadiah yang disengaja dengan niat penuh untuk membuat modal sosial. Pemikiran ini bergantung pada pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber-sumbernya sendiri yang, jika dikumpulkan,

dapat sangat meningkatkan kehidupan finansial.

Tujuan dari bimbingan belajar itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa perubahan iklim yang substansial terjadi dan memberdayakan individu yang dipersilakan untuk mencoba menggabungkan kepercayaan dan kemampuan untuk mengelola masalah (Sumodiningrat, 1997), pertemuan harus dilakukan karena mereka tidak dapat menangani masalah sendirian dan seorang sahabat karib akan menghadiri pertemuan itu. Dikatakan demikian karena orang yang menyelesaikan tindakan berpikir kritis bukanlah sahabat karib. Teman hanya berperan dalam bekerja dengan cara menangani masalah bersama dengan daerah setempat.

Dalam ulasan ini, para ilmuwan survei konsekuensi menggunakan skala Likert untuk memeriksa efek samping dari jajak pendapat untuk mengukur informasi kualitatif sebagai reaksi tertentu dan negatif. Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah ke 2 tentang kemudahan pendampingan, Penerjemah, dan Penyediaan Fasilitas Yang Mudah Diakses Di Tempat Layanan Publik peneliti pertama mengobservasi terhadap guru anak berkebutuhan khusus yang sedang melakukan pendampingan pembelajaran dengan kasus anak slowlener yaitu merupakan anak yang mengalami lamban belajar, lamban terampil, dan lamban mamahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Akibat kekurangan maupun kelebihan yang dimilikinya, anak mengalami hambatan dalam belajar, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, maupun dalam pengelolaan emosi yang mengakibatkan dampak-dampak tertentu. maka guru anak berkebutuhan khusus melakukan pendampingan dalam proses pembelajaran pada saat itu adalah membaca, guru melakukan pembelajaran step by step dengan tujuan agar anak berkebutuhan khusus tersebut mengerti dengan tujuan jika anak berkebutuhan tersebut terjun langsung bersosialisasi terhadap orang lain atau orang sekitar anak berkebutuhan khusus mengetahui yang di maksud dalam lawan pembicaraan, serta guru melatih sosial anak tersebut berdasarkan undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang pendidikan inklusif, kata guru tersebut “untuk anak yang seperti ini kita menggunakan metode gerakan tangan mas salah satunya, tergantung

dari kemampuan anak tersebut, jika menggunakan suara dan dapat dipahami oleh orang lain maka saya memakai suara, jika anak berkebutuhan tersebut tidak mampu dalam melakukan komunikasi menggunakan suara maka ada cara lain yaitu menggunakan metode braille”. Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tuna netra. Sistem ini diciptakan oleh seorang berkebangsaan Perancis yang bernama Louis Braille. Louis Braille lahir di Coupvray, 4 Januari 1809 dan meninggal 6 Januari 1852 yang kebutaannya diakibatkan matanya tertusuk jarum. Ketika bersekolah khusus untuk penderita tuna netra, seorang prajurit bernama Charles Barbier mengunjungi sekolah tersebut dan menunjukkan suatu kode yang telah ditemukannya. Sistem tersebut dikatakan sebagai "tulisan malam" (night writing) yang dirancang khusus untuk tentara perang dengan menggunakan kombinasi duabelas titik. Louis Braille akhirnya menyadari manfaat sistem ini kemudian mengembangkan sistem yang lebih sederhana dengan menggunakan enam titik.

Sistem tulisan Braille mencapai taraf kesempurnaan di tahun 1834. Huruf-huruf Braille menggunakan kerangka penulisan seperti kartu domino. Satuan dasar dari sistem tulisan ini disebut sel Braille, di mana tiap sel terdiri dari enam titik timbul yaitu tiga baris dengan dua titik. Keenam titik tersebut dapat disusun sedemikian rupa hingga menciptakan 64 macam Sistem tulisan Braille mencapai taraf kesempurnaan di tahun 1834. Huruf-huruf Braille menggunakan kerangka penulisan seperti kartu domino Satuan dasar dari sistem tulisan ini disebut sel Braille, di mana tiap sel terdiri dari enam titik timbul yaitu tiga baris dengan dua titik. Keenam titik tersebut dapat disusun sedemikian rupa hingga menciptakan 64 macam. Untuk selanjutnya peneliti mengobservasi pada guru anak berkebutuhan khusus yang pada saat itu sedang melakukan pembelajaran kerajinan ketrampilan yang dilakukan anak berkebutuhan khusus tersebut adalah kerajinan menggambar dengan tema apa cita cita kelak kalau sudah besar. Peneliti mengobservasi anak yang berkebutuhan khusus mengamati, dan menanyakan kepada guru yang mendampingi. Peneliti mengajukan pertanyaan mengapa di sekolah luar biasa bhakti wiyata di adakan kurikulum ketrampilan dalam hal menggambar guru merespon “begini mas, untuk anak berkebutuhan khusus kita harus ada

yang namanya ketrampilan untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang pendidikan inklusif itu mas, dan anak-anak tersebut sangat antusias dan kitanya juga sebagai guru-guru mereka senang karena anak-anak sangat aktif bertanya bagaimana orangtua sendiri yang rasa ingin tahunya tinggi, akan tetapi di sekolah kita ini untuk fasilitas seperti perpustakaan serta komputer banyak yang harus di perbaiki karena anak-anak tersebut. Kitanya tidak bisa menyalahkan karena memang sikap mereka yang begitu, dan kita kalo tegasin maka sangat berbahaya bagi peserta didik itu sendiri, sangat berpengaruh bagi mental mereka, karena anak seperti itu paham akan kelemahan dia sendiri dan menyadari kalo mereka itu anak istimewa (penyebutkan mereka bagi peserta didik itu sendiri). Lalu kedua peneliti mengobservasi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah dasar luar biasa bhakti wiyata itu sendiri. Peneliti melihat banyaknya fasilitas pendukung pembelajaran yang harusnya sudah di rekondisi yang lebih baik dan bagus dan harus menarik bagi peserta didik tersebut. Salah satunya, tembok-tembok yang banyaknya coretan-coretan, taman bermain yang rusak, lab komputer, lab untuk kesenian musik, apalagi untuk fasilitas kursi serta meja yang seharusnya di rekondisi. Dari kepala sekolah bhakti wiyata sendiri merepons “begini mas, untuk masalah fasilitas yang ada di sekolah bhakti wiyata ini memang sudah waktunya di rekondisi atau diperbarui, dari kita pihak sekolah dan yayasan sekolah ini kita sudah mengajukan di pemerintah sudah mengajukan proposal juga untuk fasilitas seperti bangku sekolah, lalu peremajaan gedung dengan tujuan agar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut dapat melakukan kegiatan pembelajaran seperti komputer lalu seni musik, dan lain sebagainya. Saya juga sudah melakukan pertemuan rutin kepada orangtua anak berkebutuhan khusus tersebut untuk membahas masalah fasilitas sekolah, serta mungkin ada masukan orangtua untuk kita selaku pihak sekolah, dan itu dilakukan secara rutin setiap 1 semester sekali yang di adakan di sekolah kita sendiri sembari menunggu anaknya pulang sekolah, dan tentunya kita sudah membuat kesepakatan untuk pertemuan setiap hari rabu tiap-tiap semester”. Selanjutnya peneliti mengobservasi dan wawancara selaku orangtua murid anak berkebutuhan khusus dengan peneliti menanyakan tentang kemudahan pendampingan, penerjemah dan penyediaan fasilitas yang ada di

area sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya. Peneliti mengajukan pertanyaan apakah guru-guru atau pendamping yang ada di sekolah ini melakukan pendampingan serta pemberian fasilitas yang layak terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jawaban dari orangtua tersebut “untuk pendampingan di sekolah ini sudah bagus mas, sudah sesuai dengan saya sendiri adanya kecocokan, mungkin pada saat siang mungkin kurangnya pendampingan bagi anak saya yang istimewa, tapi saya sadar mas, untuk siang hari karena memang sudah capek, karena dalam sehari mereka mendampingi anak saya dan sangat memperhatikan bagai anaknya sendiri, lalu untuk fasilitas yang ada di sekolah dasar luar biasa ini memang perlu di akannya pembenahan terutama terhadap fasilitas yang menyangkut tentang pembelajaran, seperti komputer, proyektor, lab seni musik serta taman bermain. Tapi kita selaku wali murid anak sudah diajak diskusi dengan ketua yayasan serta kepala sekolah ini, dan sudah mengajukan proposal di dinas setempat yang menaungi bagian sekolah luar biasa ini. Kita sebagai wali murid hanya harus bersabar untuk menunggu hasilnya”

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pada bab ini menyampaikan kesimpulan dari hasil serta pembahasan dengan yang pertama kelayakan akomodasi dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi untuk anak berkebutuhan khusus dengan responden yang di tujukan untuk direktur Sekolah Luar Biasa (SLB), Kepala Sekolah SLB, Guru SLB, Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus itu sendiri dengan tujuan mengetahui akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dengan berlandaskan Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 serta yang kedua tentang kemudahan pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik untuk anak berkebutuhan khusus dengan tujuan peneliti mengetahui pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik di SLB dengan berlandaskan Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif Dari hasil observasi peneliti yang berada di bab V

dengan kelayakan akomodasi dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dengan mengajukan pertanyaan ke observan total 30 pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan hasil dengan yayasan sekolah, kepala sekolah, guru atau pendamping hingga ke orang tua wali murid anak berkebutuhan khusus dianggap layak sesuai dengan undang-undang No. 08 tahun 2016 hanya perlu pembenahan di bagian fasilitas anak berkebutuhan khusus di utamakan dalam sangkutan hal pembelajaran seperti, lab komputer, proyektor serta bangunan yang perlu diperbaiki hingga sarana prasarana untuk anak berkebutuhan khusus untuk menunjang keberhasilan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Serta kedua tentang mengetahui kemudahan pendampingan, penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik mendapatkan dengan hasil dianggap layak dan hanya perlu pembenahan di dalam sarana prasarana dan penambahan guru yang sesuai dengan bidang studi ketika mengajar, dengan tujuan agar bisa memaksimalkan proses pembelajaran dalam anak berkebutuhan khusus, karena dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di perlukan perlakuan khusus dalam mendidiknya dan di perlukan hati nurani dan tingkat kesabaran yang tinggi dan menganggap anak berkebutuhan khusus seperti anaknya sendiri.

Tingkat keberhasilan seorang guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus tersebut ketika bisa di terima masyarakat sekitar dan bisa berkomunikasi walaupun dengan berbagai kekurangannya anak berkebutuhan khusus. Dibaliknya kurangnya anak berkebutuhan khusus tersebut terdapat jiwa kerajinan yang tinggi dan rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengetahui hal-hal yang dianggap tidak pernah dilakukan dan orangtua wali murid anak berkebutuhan khusus puas dengan pelayanan guru-guru yang ada di sekolah luar biasa bhakti wiyata surabaya, hanya untuk sarana prasarana yang perlu di perbaiki dalam waktu dekan agar menunjang proses pembelajaran yang maksimal sesuai dengan kurikulum dan mengacu pada undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang pendidikan inklusif terhadap pertanyaan yang diajukan oleh

Peneliti dari penerjemah, pendampingan, serta fasilitas yang disediakan SLB.

2. Rekomendasi

Untuk Kepala Sekolah SLB

- a) Sarana dan prasarana di SLB hendaknya lebih di lengkapi. Misalnya dengan menambah ruang UKS dan ruang Komputer, memperbaiki atau mengganti inventaris kelas yang sudah rusak.
- b) Melengkapi alat permainan edukatif untuk anak berkebutuhan khusus.
- c) Menambah jumlah guru yang sesuai dengan kependidikan anak berkebutuhan khusus.
- d) Menjalin kerjasama yang baik antar guru dan orangtua agar dapat saling memantau perkembangan anak dengan maksimal.
- e) Kepala sekolah harus berupaya merekatkan orangtua siswa untuk berpartisipasi dalam kemajuan Pendidikan dengan membentuk paguyuban walimurid.

Untuk Guru SLB

- a) Guru harus memiliki cara mengajar yang bervariasi agar anak berkebutuhan khusus tidak merasa jenuh saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
- b) Guru harus memberikan apresiasi terhadap hasil karya anak berkebutuhan khusus sehingga bisa meningkatkan keberanian pada anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Dari Buku oleh Dua Pengarang
- Arinkunto, S. (2011). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Author's Guide 1975, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Cohen, Morris R, & Ernest Nagel, 1939, An Introduction to Logic and Scientific Method, Harcourt, Brace & Co., New York.
- Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Lumajang: Widya Gama Press.
- Hayden, T. (2004). Mengakomodasi Murid Berkebutuhan Khusus. Makalah Workshop Kelas Pelangi: Pengalaman Hayden Mendidik

- Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Depdiknas.
- Kline, J. W. (2006). *Learning Disability and Related Disorders Characteristics and Teaching Strategies* 10thn. Boston New York: Houghton Mifflin Company.
- Mulyadi. (2010). *Diagnosis Kesulitan Belajar*. Yogyakarta: Nuha Litera.
- Nazir, M. R. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rudiyati, S. (2010). *Potret Sekolah Inklusif di Indonesia*. Yogyakarta: Akeswari.
- Samsudin, A. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja .
- Smith, D. (2009). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*, Bandung: Nuansa.
- Sosial, D. B. (2007). *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Sumodiningrat. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Winkel. (2004). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sonny, Sumarsono. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
- Sukanto, R, et al. 1980, *Business Forecasting*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Sutopo.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta
- Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Penerbit Handayani, 1992.
- Van Horn, Carl dan Van Meter, Donald. 1975, *Model-Model Dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta
- Van Horne, James C 1986, *Financial Management and Policy*, Ninth Edition, New Jersey, Prentice-Hall International Editions.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
- Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang. PT Danar Wijaya, 1999
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi.. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media. Presindo, 2002
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*. Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group
- _____, 1990, *Fundamentals of Financial Management*, Sixth Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey.